

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan atau organisasi adalah kesepakatan antara kepala dan agen, dengan melihat penunjukan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada spesialis. *Agency Theory* menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi memiliki dua regu yang berinteraksi satu sama lain. Dua regu ini adalah yaitu pemilik organisasi (investor perusahaan) dan eksekutif perusahaan (manajer). Investor menjadi kepala, dan manajemen perusahaan setiap individu diberikan wewenangan oleh investor untuk menjalankan organisasi yang disebut agen. Organisasi-organisasi yang memiliki fungsi pengelolaan dan kepemilikan yang berbeda, tidak akan berdaya menghadapi bentrokan jabatan yang disebabkan oleh masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbenturan. Khususnya berusaha untuk mencapai kemajuan mereka sendiri.

Untuk membatasi konflik di antara mereka, maka pemilik dan eksekutif perusahaan membuat peraturan kontrak bisnis dengan menetapkan sejauh mana hak istimewa dan komitmen masing-masing untuk mencapai utilitas yang diharapkan. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan utilitas pemilik dan dapat

memenuhi serta memastikan manajemen untuk mendapat konsekuensi berupa penghargaan atas hasil dedikasi nya dalam mengelola perusahaan.

Penulis berpendapat tentang teori keagenan memiliki hubungan dengan tingkat kesehatan dari sudut pandang keuangan, lebih spesifiknya yaitu hubungan dan keuntungan yang didapatkan kedua regu sesuai tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat kesehatan aspek keuangan perusahaan, maka akan semakin tinggi manfaat dan semakin baik pula hubungan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pemilik menuntut kinerja keuangan yang baik karena telah memberikan kepercayaan kepada manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan khususnya aspek keuangan sehingga manajemen juga berkewajiban untuk mengembalikan kepada pemilik perusahaan berupa pengelolaan keuangan yang maksimal serta menghasilkan tingkat kesehatan yang memuaskan. Apabila terjadi sebaliknya, tingkat kesehatan aspek keuangan menjadi rendah. Hal ini berpengaruh negatif dan akan memberikan konsekuensi yang buruk bagi kedua belah pihak.

2.2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2.2.1 Pengertian dan Tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengartikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan substansi bisnis yang semua atau hampir keseluruhan modalnya dikuasai pemerintah. Nilai penyertaan modal pada BUMN dilakukan melalui penyertaan secara langsung yang diperoleh dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang diperoleh APBN yang digunakan sebagai penyertaan

modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN dibangun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut.

- a. Menambah kemajuan perekonomian masyarakat secara menyeluruh dan pendapatan negara.
- b. Mencari profit.
- c. Mengadakan kemanfaatan umum yakni memberikan barang dan/atau jasa yang berkualitas dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas.
- d. Menjadi pelopor berbagai aktivitas bisnis yang tidak bisa diselenggarakan oleh pihak koperasi maupun swasta.
- e. Berpartisipasi secara efektif dalam memberikan arahan dan subsidi pada koperasi, pengusaha golongan ekonomi rendah, dan masyarakat.

2.2.2 Jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2003, BUMN diklasifikasikan menjadi sebagai berikut.

1) Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan Perseroan (Persero) merupakan BUMN sebagai perusahaan risiko terbatas dengan tujuan agar kepemilikannya dipisahkan atas seluruh kepemilikan atau paling kecil 51% kepemilikannya dikuasai oleh negara. Persero didirikan sebagai pencari laba dalam mengembangkan nilai organisasi dengan memberikan barang dan/atau jasa dengan kualitas mumpuni dengan intensitas yang besar.

2) Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (Perum) merupakan BUMN yang tidak terbagi dalam saham dan seluruh modalnya diklaim oleh Negara Republik Indonesia. Pembangunan Perum bertujuan untuk memberikan barang dan/atau jasa yang berkualitas untuk kepentingan umum diikuti biaya yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.

2.3 Laporan Keuangan

Seperti yang tercantum pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015), laporan keuangan merupakan suatu penyajian sistematis dari posisi keuangan dan performa substansi dalam mempertahankan usahanya. Sementara itu, Utomo (2019) mengungkapkan jika laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan sebuah perusahaan yang sedang berlangsung pada periode yang bersangkutan. Kieso et al., (2018) mendefinisikan laporan keuangan sebagai alat utama yang digunakan suatu perusahaan untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai informasi keuangan di perusahaan tersebut. Hidayat et al., (2022) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan catatan penting yang memberikan gambaran keadaan keuangan organisasi dan pelaksanaannya pada periode yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, Murhadi (2009) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisi data untuk memberikan pemahaman kepada pihak pengguna mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan. Meningat beberapa penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan penyajian laporan yang berisi data tentang kondisi keuangan

organisasi atau perusahaan pada periode yang bersangkutan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Dalam menganalisis kesehatan suatu bank, diperlukan data-data keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan bank tersebut. PSAK 1 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2015) menyebutkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan data tentang kondisi keuangan, kinerja atau pelaksanaan keuangan, dan pendapatan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan begitu penting bagi pihak-pihak terkait untuk mengetahui kondisi bisnis dan kesehatan perusahaan pada periode tertentu.

2.4 Kesehatan BUMN

2.4.1 Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

Menurut KEP-100/MBU/2002, dalam menilai tingkat kesehatan BUMN dapat dikategorikan:

1) SEHAT, yang terdiri dari:

- | | |
|-----|--|
| AAA | apabila total (TS) lebih besar dari 95 |
| AA | apabila $80 < TS \leq 95$ |
| A | apabila $65 < TS \leq 80$ |

2) KURANG SEHAT, yang terdiri dari :

- | | |
|-----|---------------------------|
| BBB | apabila $50 < TS \leq 65$ |
| BB | apabila $40 < TS \leq 50$ |
| B | apabila $30 < TS \leq 40$ |

3) TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :

- | | |
|-----|---------------------------|
| CCC | apabila $20 < TS \leq 30$ |
|-----|---------------------------|

CC apabila $10 < TS \leq 20$

C apabila $TS \leq 10$

Tingkat Kesehatan BUMN ditentukan sesuai dengan evaluasi mengenai kinerja perusahaan pada tahun anggaran, mencakup penilaian terhadap:

- 1) Aspek Keuangan.
- 2) Aspek Operasional.
- 3) Aspek Administrasi.

Dalam menilai tingkat kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya dilakukan terhadap BUMN jika perhitungan keuangan tahunan perusahaan dan hasil pemeriksaan akuntan menyatakan kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan maupun akuntan publik. Evaluasi tingkat kesehatan BUMN diselesaikan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan.

2.4.2 Indikator Penilai Tingkat Kesehatan BUMN Aspek Keuangan

1) Rasio Profitabilitas

Menurut Putu et al., (2015) rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kapasitas perusahaan saat mencari keuntungan. Rasio profitabilitas berbanding lurus terhadap tingginya kapasitas perusahaan untuk mendapatkan profit. Rasio yang digunakan sebagai pengukur profitabilitas sesuai SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 adalah:

a. *Return On Equity (ROE)*

Tingkat pengembalian atas ekuitas (*ROE*) adalah rasio sebagai pengukur keuntungan setelah pajak yang dibebankan pada modal sendiri. Rasio *ROE*

menandakan produktivitas pemanfaatan modal. Tinggi rasionya berbanding lurus dengan kekuatan posisi pemilik perusahaan. Rumus untuk mencari *return on equity* adalah:

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

b. *Return On Investment (ROI)*

Return on Investment (ROI) merupakan proporsi yang menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan manfaat berupa keuntungan dengan sumber daya/aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Formula untuk menghitung *Return On Investment (ROI)* adalah sebagai berikut.

$$ROI = \frac{\text{Laba Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2) Rasio Likuiditas

Menurut Putu et al., (2015), rasio likuiditas adalah proporsi yang memiliki fungsi sebagai penanda atau pengukur kapasitas suatu organisasi untuk melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo, baik kewajiban di dalam perusahaan maupun kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha). Dalam penelitian ini penggunaan rasio untuk mengukur likuidita berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 adalah:

a. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Cash Ratio menurut Sofyan (2019) adalah rasio yang dijadikan sebagai pengukur berapa banyak uang yang dapat dijadikan untuk melunasi kewajiban. Rumus perhitungan rasio kas:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar adalah proporsi yang dijadikan sebagai penunjuk kapasitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (aktiva lancar). Persamaan untuk menemukan rasio ini adalah sebagai berikut.

$$Rasio Lancar = \frac{Aktiva Lancar}{Kewajiban Jangka Pendek} \times 100\%$$

3) Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas menurut Harahap & Masyitah (2018) adalah rasio yang menunjukkan kegiatan perusahaan saat melakukan aktivitas operasionalnya baik pada aktivitas transaksi pembelian maupun penjualan, serta kegiatan yang lainnya. Selain itu, Sofyan (2019) juga menjabarkan mengenai rasio aktivitas yakni rasio ini menunjukkan berbagai komposisi perusahaan dari setiap bagian aset lancar dan kewajiban lancar yang menyebabkan tingkat likuiditas dari masing-masing current account dapat diketahui. Ada beberapa macam rasio aktivitas, yakni sebagai berikut.

a. *Collection Periods*

Hasil perhitungan ini menandalam jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih atau melakukan pengumpulan piutang. Semakin pendek jangka waktunya, semakin baik.

$$Collection Periods = \frac{Total Piutang Usaha}{Total Pendapatan Usaha} \times 365 hari$$

b. Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*)

Rasio ini sebagai penunjuk berapa waktu yang dibutuhkan untuk jumlah stok berputar pada siklus produksi yang normal.

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

c. Perputaran total asset (*Total Asset Turn Over*)

Rasio ini menunjukkan perputaran total sumber daya yang dihitung berdasarkan frekuensi transaksi penjualan, atau dapat dikatakan seberapa tinggi kapasitas semua aktiva dalam penciptaan penjualan.

$$\text{Total Asset Turn Over} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

4) Rasio Solvabilitas

Menurut Kusuma (2012) rasio solvabilitas (*leverage*) merupakan proporsi yang berguna dalam hal mengetahui seberapa banyak perusahaan memanfaatkan subsidi pendanaan melalui utang (*financial leverage*). Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur solvabilitas perusahaan berdasar pada SK Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 yaitu rasio modal sendiri terhadap total aktiva (*Total Equity to Total Asset*). Rasio ini digunakan sebagai pengukur sumber pendukung pelunasan utang yang dijadikan pendanaan biaya, dengan formula perhitungan sebagai berikut.

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.4.3 Mekanisme Penilaian Kesehatan BUMN Aspek Keuangan

BUMN apabila termasuk dalam golongan non jasa keuangan di kelompokkan menjadi dua, yaitu BUMN yang berperan di bidang infrastruktur atau disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang berperan dalam bidang non-infrastruktur atau disebut BUMN NON- INFRASTRUKTUR. Sebagaimana dinyatakan dalam SK Menteri Nomor: KEP-100/MBU/2002 pasal 5 ayat (1), BUMN INFRASTRUKTUR merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas untuk memberikan tenaga dan hasil produksinya demi kepentingan umum, yang bisnisnya mencakup bidang pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik; perolehan sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api; jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara; bendungan dan irigrasi. Sedangkan BUMN NON-INFRASTRUKTUR merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki bidang usaha selain yang disebutkan pada BUMN INFRASTRUKTUR sejalan dengan yang disebut pada SK Menteri Nomor: KEP-100/MBU/2002 pasal 5 ayat (3).

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan BUMN yang akan diteliti merupakan kelompok BUMN infrastruktur atau BUMN non-infrastruktur. Bobot dikelompokkan karena setiap BUMN memiliki kegiatan yang berbeda sesuai dengan bidang usahanya, sehingga dalam menilai tingkat kesehatan aspek keuangan antar kelompok BUMN juga memiliki bobot yang berbeda. Total bobot ini digunakan sebagai proporsi penghitungan skor kesehatan, sehingga semakin tinggi total bobot BUMN maka semakin tinggi nilai pembagi dalam

penghitungan skor BUMN. Seperti yang dijelaskan pada SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 pembagian bobot pada perhitungan aspek keuangan dibagi menjadi dua. Apabila termasuk ke dalam BUMN INFRASTRUKTUR, maka BUMN tersebut memiliki bobot 50. Namun, jika termasuk ke dalam BUMN NON-INFRASTRUKTUR, maka BUMN tersebut memiliki bobot 70. Setelah mengetahui total bobot BUMN, kemudian dilakukan penentuan indikator yang akan dinilai serta bobot maksimal masing-masing indikator sesuai dengan kelompok bidang BUMN.

Tabel II. 1 Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non-Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (<i>ROE</i>)	15	20
2. Imbalan Investasi (<i>ROI</i>)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. <i>Collection Periods</i>	4	5
6. Perputaran Persediaan	4	5
7. Perputaran Total Asset	4	5
8. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

Sumber: Diolah dari SK Menteri BUMN Nomor:KEP-100-MBU-2002

Untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang tercantum dalam Bab I, maka perlu dilakukan penghitungan nilai setiap indikator aspek keuangan. Berkaitan dengan tingkat kesehatan keuangan perusahaan selama tahun periode 2017-2020, menurut SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 maka penghitungan indikator pendukung sangat penting untuk dicermati. Indikator tersebut diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut.

1) Imbalan kepada pemegang saham / *Return On Equity (ROE)*

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Return on Equity (ROE) merupakan indikator penanda kapasitas modal perusahaan untuk menciptakan laba bagi investor baik dari pemilik saham biasa maupun saham preferen. Laba setelah pajak yaitu keuntungan sesudah pajak dikurangkan hasil keuntungan terjualnya saham penyertaan langsung, sumber daya tetap, sumber daya non-produktif, dan sumber daya lain-lain. Modal Sendiri merupakan semua bagian modal pribadi dalam laporan posisi keuangan perusahaan saat kondisi akhir tahun anggaran dikurangkan bagian modal pribadi yang menjadi pendanaan sumber daya tetap pada kinerja kegiatan operasional serta profit tahun yang bersangkutan.

2) Imbalan Investasi / *Return On Investment (ROI)*

$$ROI = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Return On Investment (ROI) menunjukkan kapasitas modal sebagai investasi pada sumber daya secara menyeluruh dengan tujuan menghasilkan laba netto. EBIT adalah keuntungan sebelum pajak dan bunga dikurangkan hasil keuntungan terjualnya saham penyertaan langsung, sumber daya tetap, sumber daya lain-lain, dan sumber daya non-produktif. Makna dari penyusutan merupakan depresiasi, deplesi, dan amortisasi. *Capital Employed* merupakan keadaan saat akhir tahun anggaran jumlah seluruh sumber daya dikurangkan dengan aktiva.

3) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Cash ratio merupakan indikator yang menunjukkan kapasitas perusahaan dalam hal mendanai utang yang diketahui melalui uang yang tersedia pada perusahaan serta efek yang dapat dicairkan dengan segera. Kas, bank dan surat berharga jangka pendek sesuai dengan keadaan dalam akhir tahun anggaran. *Current liabilities* yaitu tempat semua utang lancar dalam akhir tahun anggaran.

4) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Current ratio menandakan kapasitas dalam melunasi kewajiban yang harus dilunasi dengan segera menggunakan sumber daya lancar, sedangkan *current asset* merupakan tempat dari semua sumber daya lancar pada akhir tahun anggaran. *Current liabilities* adalah tempat dari jumlah seluruh utang lancar saat akhir tahun anggaran.

5) *Collection Periods (CP)*

$$\text{Collection Periods} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Collection Periods (CP) sebagai penunjuk jangka waktu pengumpulan piutang. Jumlah seluruh piutang usaha merupakan total piutang usaha yang pada akhir tahun anggaran telah dikurangkan dengan cadangan penyisihan piutang. Total pendapatan usaha merupakan jumlah dari penghasilan bisnis selama tahun anggaran.

6) Perputaran Persediaan (PP)

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Perputaran persediaan menandakan frekuensi stok perusahaan terjual selama periode tertentu. Total persediaan merupakan semua stok yang dipakai untuk siklus produksi saat akhir tahun anggaran yakni stok bahan baku, stok barang setengah jadi dan stok barang jadi ditambah dengan stok perlengkapan serta suku cadang. Total pendapatan usaha adalah jumlah penghasilan bisnis pada tahun anggaran tertentu.

7) Perputaran Total Asset / *Total Asset Turn Over (TATO)*

$$\text{Total Asset Turn Over} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Total Asset Turn Over (TATO) menandakan pengukuran kegiatan operasional sumber daya dan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan penjualan menggunakan sumber daya tersebut. Total pendapatan merupakan jumlah penghasilan usaha dan non-usaha, kecuali penghasilan atas penjualan sumber daya tetap. *Capital employed* merupakan keadaan akhir tahun anggaran dari jumlah sumber daya dikurangi sumber daya tetap dalam kegiatan operasional.

8) Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio total modal sendiri terhadap total aset menandakan korelasi antara modal pribadi perusahaan dan jumlah sumber daya. Tinggi rendahnya rasio ini berbanding terbalik dengan total modal awal pinjaman yang berguna sebagai pendanaan sumber daya perusahaan, sedangkan total modal sendiri merupakan jumlah dari semua bagian modal pribadi saat akhir tahun anggaran kecuali seluruh dana yang status nya belum sepenuhnya ditetapkan. Total aset merupakan jumlah

sumber daya dikurangi seluruh dana yang belum statusnya belum sepenuhnya ditetapkan pada poisisi akhir tahun anggaran yang berlaku.

Penelitian ini dalam melaksanakan penentuan skor memerlukan pembandingan nilai setiap indikator yang melibatkan daftar skor untuk menilai setiap indikator dari sudut pandang keuangan. Dengan cara ini, untuk mengetahui daftar skor penilaian setiap indikator keuangan, diperlukan daftar skor penilaian seperti pada tabel II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, dan II.9 berikut.

1) Daftar Skor Penilaian *ROE*

Tabel II. 2 Daftar Skor Penilaian *ROE*

<i>ROE (%)</i>	Skor	
	Infra	Non-Infra
$15 < ROE$	15	20
$13 < ROE \leq 15$	13,5	18
$11 < ROE \leq 13$	12	16
$9 < ROE \leq 11$	10,5	14
$7,9 < ROE \leq 9$	9	12
$6,6 < ROE \leq 7,9$	7,5	10
$5,3 < ROE \leq 6,6$	6	8,5
$4 < ROE \leq 5,3$	5	7
$2,5 < ROE \leq 4$	4	5,5
$1 < ROE \leq 2,5$	3	4
$0 < ROE \leq 1$	1,5	2
$ROE < 0$	1	0

Sumber: Diolah dari SK Menteri BUMN Nomor:KEP-100-MBU-2002

Skor penilaian untuk *Return On Equity (ROE)* memiliki proporsi bobot yang paling besar diantara indikator penilaian lainnya. Seperti yang tersaji dalam tabel II.2, *ROE* untuk perusahaan infrastruktur memiliki bobot maksimal 15 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 50. Ini menandakan bahwa *ROE* memiliki

proporsi bobot yang besar yaitu sekitar 30% dari total bobot maksimal seluruh indikator.

Begitu pula dengan perusahaan non-infrastruktur yang memiliki bobot maksimal 20 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 70. Hal ini menunjukkan bahwa *ROE* non-infrastruktur memiliki proporsi bobot yang besar yaitu sekitar 28,5% dari total bobot maksimal seluruh indikator.

2) Daftar Skor Penilaian *ROI*

Tabel II. 3 Daftar Skor Penilaian *ROI*

<i>ROI (%)</i>	Skor	
	Infra	Non-Infra
$18 < ROI$	10	15
$15 < ROI \leq 18$	9	13,5
$13 < ROI \leq 15$	8	12
$12 < ROI \leq 13$	7	10,5
$10,5 < ROI \leq 12$	6	9
$9 < ROI \leq 10,5$	5	7,5
$7 < ROI \leq 9$	4	6
$5 < ROI \leq 7$	3,5	5
$3 < ROI \leq 5$	3	4
$1 < ROI \leq 3$	2,5	3
$0 < ROI \leq 1$	2	2
$ROI < 0$	0	1

Sumber: Diolah dari SK Menteri BUMN Nomor:KEP-100-MBU-2002

Penilaian skor untuk *ROI* juga memiliki proporsi bobot terbesar kedua setelah *ROE*. Berdasarkan pada data yang tersaji dalam tabel II.3, *ROI* untuk perusahaan infrastruktur memiliki bobot maksimal 10 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 50. Ini menandakan bahwa *ROI* memiliki proporsi bobot yang cukup besar yaitu sekitar 20% dari total bobot maksimal seluruh indikator.

Begitu pula dengan perusahaan non-infrastruktur yang memiliki bobot maksimal 15 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 70. Hal ini menunjukkan bahwa *ROI* non-infrastruktur memiliki proporsi bobot yang besar yaitu sekitar 21,4% dari total bobot maksimal seluruh indikator.

3) Daftar Skor Penilaian *Cash Ratio*

Tabel II. 4 Daftar Skor Penilaian *Cash Ratio*

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non-Infra
$x \geq 35$	3	5
$25 \leq x < 35$	2,5	4
$15 \leq x < 25$	2	3
$10 \leq x < 15$	1,5	2
$5 \leq x < 10$	1	1
$0 \leq x < 5$	0	0

Sumber: Diolah dari SK Menteri BUMN Nomor:KEP-100-MBU-2002

Berbeda dengan indikator sebelumnya, skor penilaian untuk *cash ratio* tidak memiliki proporsi bobot yang cukup besar. Bobot pada *cash ratio* menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang dengan uang yang ada dan efek yang dapat dicairkan dengan segera. Seperti pada data yang tersaji dalam tabel II.4, *cash ratio* untuk perusahaan infrastruktur memiliki bobot maksimal 3 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 50 atau hanya 6% dari total bobot maksimal seluruh indikator. Begitu pula dengan perusahaan non-infrastruktur, bobot maksimal *cash ratio* hanya 5 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 70 atau hanya sekitar 7,1% dari total bobot maksimal seluruh indikator.

4) Daftar Skor Penilaian *Current Ratio*

Tabel II. 5 Daftar Skor Penilaian *Current Ratio*

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non-Infra
$125 \leq x$	3	5
$110 \leq x < 125$	2,5	4
$100 \leq x < 110$	2	3
$95 \leq x < 100$	1,5	2
$90 \leq x < 95$	1	1
$x < 90$	0	0

Sumber: Diolah dari SK Menteri BUMN Nomor:KEP-100-MBU-2002

Skor penilaian untuk *current ratio* tidak memiliki proporsi bobot yang cukup besar. Seperti pada data yang tersaji dalam tabel II.5, *current ratio* untuk perusahaan infrastruktur memiliki bobot maksimal 3 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 50 atau hanya 6% dari total bobot maksimal seluruh indikator. Begitu pula dengan perusahaan non-infrastruktur, bobot maksimal *cash ratio* hanya 5 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 70 atau hanya sekitar 7,1% dari total bobot maksimal seluruh indikator.

5) Daftar Skor Penilaian *Collection Periods*

Penilaian skor untuk *collection periods* tidak memiliki proporsi bobot yang cukup besar. Seperti pada data yang tersaji dalam tabel II.6, *collection* untuk perusahaan infrastruktur memiliki bobot maksimal 3 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 50 atau hanya 6% dari total bobot maksimal seluruh indikator. Begitu pula dengan perusahaan non-infrastruktur, bobot maksimal *cash ratio* hanya 5 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 70 atau hanya sekitar 7,1% dari total bobot maksimal seluruh indikator.

Tabel II. 6 Daftar Skor Penilaian Collection Periods

CP = X (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non-Infra
$x \leq 60$	$x > 35$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Sumber: Diolah dari SK Menteri BUMN Nomor:KEP-100-MBU-2002

6) Daftar Skor Perputaran Persediaan (PP)

Tabel II. 7 Daftar Skor Perputaran Persediaan (PP)

CP = X (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non-Infra
$x \leq 60$	$35 < x$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Sumber: Diolah dari SK Menteri BUMN Nomor:KEP-100-MBU-2002

Penilaian skor untuk perputaran persediaan tidak memiliki proporsi bobot yang cukup besar. Seperti pada data yang tersaji dalam tabel II.7, perputaran persediaan untuk perusahaan infrastruktur memiliki bobot maksimal 4 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 50 atau hanya 8% dari total bobot maksimal seluruh indikator. Begitu pula dengan perusahaan non-infrastruktur, bobot maksimal perputaran persediaan hanya 5 dari total bobot maksimal seluruh

indikator yaitu 70 atau hanya sekitar 7,1% dari total bobot maksimal seluruh indikator.

7) Daftar Skor *Total Asset Turn Over (TATO)*

Tabel II. 8 Daftar Skor *Total Asset Turn Over (TATO)*

TATO = X (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non-Infra
$120 < x$	$20 < x$	4	5
$105 < x \leq 120$	$15 < x \leq 90$	3,5	4,5
$90 < x \leq 105$	$10 < x \leq 15$	3	4
$70 < x \leq 90$	$5 < x \leq 10$	2,5	3,5
$60 < x \leq 75$	$0 < x \leq 5$	2	3
$40 < x \leq 20$	$x \leq 0$	1,5	2,5
$20 < x \leq 40$	$x < 0$	1	2
$x \leq 20$	$x < 0$	0,5	1,5

Sumber: Diolah dari SK Menteri BUMN Nomor:KEP-100-MBU-2002

Skor penilaian untuk *total asset turn over* tidak memiliki proporsi bobot yang cukup besar. Seperti pada data yang tersaji dalam tabel II.8, *total asset turn over* untuk perusahaan infrastruktur memiliki bobot maksimal 4 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 50 atau hanya 8% dari total bobot maksimal seluruh indikator. Begitu pula dengan perusahaan non-infrastruktur, bobot maksimal *total asset turn over* hanya 5 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 70 atau hanya sekitar 7,1% dari total bobot maksimal seluruh indikator.

8) Daftar Skor Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset (TMS thdp TA)

Daftar Skor terakhir yang menjadi pendukung penilaian tingkat kesehatan aspek keuangan adalah daftar skor rasio total modal sendiri terhadap total aset. Rasio ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam penentuan kesehatan keuangan perusahaan karena menandakan tentang perbandingan antara modal

pribadi dengan jumlah sumber daya, sehingga rasio ini memiliki bobot terbesar ketiga setelah *ROI*.

Tabel II. 9 Daftar Skor Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset

TATO = X (%)	Skor	
	Infra	Non-Infra
$x < 0$	0	0
$0 \leq x < 10$	2	4
$10 \leq x < 20$	3	6
$20 \leq x < 30$	4	7,25
$30 \leq x < 40$	6	10
$40 \leq x < 50$	5,5	9
$50 \leq x < 60$	5	8,5
$60 \leq x < 70$	4,5	8
$70 \leq x < 80$	4,25	7,5
$80 \leq x < 90$	4	7
$90 \leq x < 100$	3,5	6,5

Sumber: Diolah dari SK Menteri BUMN Nomor:KEP-100-MBU-2002

Penilaian untuk rasio total modal sendiri terhadap total aset memiliki proporsi bobot yang cukup besar. Seperti pada data yang tersaji dalam tabel II.9 rasio total modal sendiri terhadap total aset untuk perusahaan infrastruktur memiliki bobot maksimal 6 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 50 atau sebesar 12% dari total bobot maksimal seluruh indikator. Begitu pula dengan perusahaan non-infrastruktur, bobot maksimal rasio total modal sendiri terhadap total aset sebesar 10 dari total bobot maksimal seluruh indikator yaitu 70 atau hanya sekitar 14,3% dari total bobot maksimal seluruh indikator.

Kemudian, langkah berikutnya adalah penjumlahan skor semua indikator dari sudut pandang keuangan untuk kemudian dikorelasikan dengan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002. Setelah itu ditarik kesimpulan mengenai bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya, apakah berada dalam kondisi

sehat, kurang sehat, atau tidak sehat menurut hasil pengelompokan kategori seperti pada sub bab penggolongan penilaian tingkat kesehatan BUMN.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam menetapkan penilaian tingkat kesehatan aspek keuangan pada BUMN, penulis mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya mengenai tingkat kesehatan aspek keuangan pada BUMN yaitu sebagai berikut.

1) Irfa Ummul Chasanah (2015)

Chasanah (2015) menganalisis rasio keuangan menggunakan metode penelitian deskriptif berpedoman pada SK Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:KEP 100/MBU/2002. Penelitian ini menghasilkan penjelasan mengenai penyajian keuangan PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada tahun 2007-2013 menunjukkan bahwa perusahaan secara umum menghasilkan kriteria sehat dengan kriteria AAA.

2) Wadzil Habibah (2009)

Habibah (2009) melakukan pengujian terhadap laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian uji *t paired sampel test*. Penelitian ini menghasilkan anggapan bahwa terdapat perbedaan yang khas dari upah kerja, biaya beban kerja, laba rugi kerja, keuntungan netto antara sebelum dan sesudah menerbitkan flexi, serta tidak ditemukan adanya perbedaan pada rata-rata *NPM (Net Profit Margin)* antara sebelum dan sesudah menerbitkan flexi.

3) Resti Putri Susilawati (2017)

Susilawati (2017) melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan perusahaan dengan menggunakan pendekatan *EVA (Economic Value Added)*.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan uraian bahwa pengelolaan keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk memperlihatkan nilai yang cukup baik dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

4) Swita Angelina (2013)

Dalam penelitiannya, Angelina (2013) melakukan metode analisis data informasi mengenai pengelolaan keuangan perusahaan di PT Cipta Daya Nusantara Manado. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan menghasilkan evaluasi secara umum berdasarkan proporsi keuangan, khususnya posisi likuiditas yang dijelaskan dalam penelitian ini berada dalam keadaan sangat baik.

5) Triana Nugrahanti (2015)

Pada penelitiannya, Nugrahanti (2015) melakukan analisis yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai kinerja keuangan BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk dilihat berdasarkan perhitungan *return on equity (ROE)*, *return on investment (ROI)*, *cash ratio*, *current ratio*, *collection periods*, perputaran persediaan, perputaran *total asset turn over (TATO)*, dan rasio total modal sendiri terhadap total aktiva. Dalam analisis ini metode yang digunakan melibatkan data deskriptif kuantitatif.

6) Hilarius Andhika (2016)

Andhika (2016) menganalisis kinerja keuangan pada koperasi Cu Dharma Hatiku Yogyakarta dengan memanfaatkan rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas di tahun 2011-2015 yang dijabarkan melalui pola garis *trend* dari tahun 2011 hingga 2015. Metode pengumpulan informasi pada penelitian tersebut yaitu,

observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis memperlihatkan rasio likuiditas tahun 2011-2015 yang diperkirakan dengan *current ratio* dan memperoleh indikasi yang menandakan bahwa kinerja keuangan koperasi berada dalam kondisi yang kurang baik.